

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan politik yang terjadi di Indonesia setelah tahun 1998 memunculkan perubahan yang mendasar dalam perpolitikan Indonesia, yakni berubahnya pengelolaan negara dari otoriter menjadi demokratis dan dari sentralistik menjadi desentralisasi serta muncul istilah yang dinamakan politik lokal. Proses demokrasi pada saat itu melahirkan sebuah otonomi daerah yang mana dengan adanya otonomi daerah menyebabkan kekuasaan yang sebelumnya hanya berpusat di ibukota menjadi terdistribusi ke setiap daerah. Hal yang berubah dalam pendistribusian kekuasaan adalah dalam distribusi kewenangan, yakni daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan khusus untuk daerahnya. Penguatan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan demokrasi partisipatif dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Nuradhawati, 2019).

Dalam konteks implementasi kedaulatan rakyat, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme demokratis yang lebih luas. Pemilu menjadi sarana untuk pembuktian akan terlaksananya demokrasi suatu negara. Sebagai salah satu instrumen politik, pemilu ini menjadi salah satu upaya dalam pemenuhan hak politik masyarakat. Pada penyelenggaraan pemilu kaitannya dengan demokrasi adalah masyarakat bebas beraspirasi dalam kegiatan politik menggunakan hak politiknya untuk memilih atau menentukan pemimpinnya. Hak

politik inilah yang menjadi daya tarik para elit politik untuk berlomba-lomba meraih simpati masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya di ajang pemilu. Salah satunya ialah ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada secara langsung merupakan momentum politik dan perwujudan pemenuhan hak politik rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda yang merupakan revisi UU No. 22 Tahun 1999, telah mengubah tata cara Pilkada. Kepala Daerah yang sebelumnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diubah menjadi dipilih langsung oleh masyarakat.

Perubahan politik sentralisasi menjadi desentralisasi yang mengubah cara kita berdemokrasi di daerah salah satunya di Kabupaten Ciamis. Pasca Reformasi dan desentralisasi Kabupaten Ciamis telah memiliki 4 Bupati yaitu Oma Sasmita, Engkon Komara, Iing Syam Arifin hingga Herdiat Sunarya yang sekarang menjadi Bupati Ciamis. Menunjukkan Pilkada di Kabupaten Ciamis pasca reformasi telah berhasil mencetak pemimpin-pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat Kabupaten Ciamis. ¹

Menghadapi Pilkada Serentak tahun 2024, Kabupaten Ciamis menjadi salah satu daerah yang akan mengikuti pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah di tahun tersebut. Sudah banyak isu terkait nama-nama yang muncul sebagai bakal calon pemimpin Kabupaten Ciamis tersebut. Salah satunya ialah Herdiat Sunarya yang merupakan Bupati Kabupaten Ciamis saat ini. Sebagai calon pertahana yang digadangkan akan kembali bertarung dalam Pilkada, Herdiat Sunarya memiliki

¹ Dadang, Bupati Ciamis Dari Masa Ke Masa. Dilansir dari detik.com

modal kuat untuk menjadi calon Bupati dengan rekam jejak yang dimilikinya selama kepemimpinannya di Kabupaten Ciamis.² Dengan rekam jejak yang dimilikinya. Selain itu, dengan menjadi calon pertahana, Herdiat Sunarya melalui kekuasaan yang masih dimilikinya akan lebih mudah baginya untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat dan memiliki jejaring yang luas dengan para birokrat. Selain itu, lebih mudah untuk membangun citra positif di depan publik yang dapat dilihat dari kinerja selama menjabat pejabat publik sebelumnya.

Herdiat Sunarya lebih lama berkarir dalam bidang pemerintahan. Dalam perjalanan karier Herdiat Sunarya, dimulai ketika beliau menjadi Penanggung Jawab Sementara (PJS) Kepala Desa Panjalu. Kemudian beliau dipercaya sebagai Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Ciamis pada tahun 2009. Sampai pada akhirnya beliau diangkat menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis selama 6 tahun dimulai dari tahun 2012. Jabatan terakhir Herdiat Sunarya adalah staf di BAPPEDA. ³Herdiat Sunarya merupakan seorang birokrat yang terjun dalam dunia politik, beliau memulai karir politik dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Ciamis pada Pilkada tahun 2018 bersama Yana Diana Putra.

Dalam Pilkada Kabupaten Ciamis 2018 diikuti oleh dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Herdiat-Yana dipasangkan pada nomor urut 1 dan diusung oleh 6 partai politik yakni PKS, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, Nasdem, dan PBB. Sedangkan pasangan lain yaitu Iing-Oih dengan nomor 2

² Kekuatan Politik Herdiat Sunarya meliputi kekuasaan yang telah terbangun dan dukungan dari partai politik di ciamis yang terdiri dari PAN, PDIP, Gaolkar, PKB, PKS, PPP, PBB, Demokrat, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Ummat, PKN dan PSI.

³ Suparman, Dkk. Tipe Pemilih pada pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018. Jurnal Moderat, Vol. 4 No. 4. 2018:20

diusung oleh PDIP, Golkar, PPP, PKB, dan Hanura yang pada saat itu merupakan calon pertahan sebagai Bupati Ciamis 2014-2018.

Pasangan Herdiat-Yana berhasil meraih kemenangannya pada kontestasi Pilkada 2018. Mereka berhasil menang melawan *incumbent* Iing Syam Arifin yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Ciamis sebelumnya. Kemenangan Herdiat Sunarya melawan petahana ini menunjukkan bahwa elektabilitas Herdiat lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat yang telah menjabat sebelumnya. Citra politik yang dibangun Herdiat berhasil mengalahkan strategi lawan dengan mematahkan tingkat popularitas dan elektabilitas petahana yang lebih sulit dilawan. Pencitraan yang konsisten berhasil menarik minat masyarakat Kabupaten Ciamis untuk menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Herdiat-Yana.

Rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis tahun 2018 :

Table 1. Hasil Pilkada Kabupaten Ciamis Periode 2018-2024

No	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Hasil Suara	Koalisi Partai Politik
1	H. Herdiat Sunarya-Yana Diana Putra	415.767 (59,59%)	PKS, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, Nasdem, PBB
2	H. Iing Syam Arifin-H. Oih Burhanudin	281,947 (40,41%)	Golkar, PDIP, PPP, PKB, Hanura.

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kab. Ciamis 2018)

Melihat dari kemenangan Herdiat sebagai Bupati Kabupaten Ciamis pada periode 2018-2024, dapat dikatakan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Herdiat tergolong tinggi. Herdiat memiliki modal yang kuat untuk bertarung kembali pada

pemilihan Calon Bupati Kabupaten Ciamis tahun 2024. Citra politik dan kekuatan politi yang telah terbentuk melalui langkah -langkah pada masa jabatan sebelumnya, menjadi peluang yang besar untuk Herdiat kembali terpilih sebagai Bupati Kabupaten Ciamis berikutnya. Dengan begitu, strategi kampanye Herdiat Sunarya untuk menarik simpati publik dan membangun kekuatan politik akan semakin baik melihat dari rekam jejak selama kepemimpinan beliau sebagai Bupati Kabupaten Ciamis sebelumnya. Sedikit banyaknya beliau sudah mengetahui kondisi di lapangan apa yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Ciamis, dengan memanfaatkan hal inilah beliau diyakini mampu untuk kembali menjadi calon kandidat Kepala Daerah dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Ciamis tahun 2024.

Pembentukan citra ini selalu beriringan dengan elektabilitas seorang kandidat kontestasi politik. Tingkat elektabilitas bakal calon pemimpin ini menjadi salah satu tolak ukur masyarakat untuk memilih. Berita terkait nama-nama yang muncul sebagai bakal calon pemimpin daerah tidak lepas dengan tingkat elektabilitas disamping-Nya. Begitu pun dengan Heridat Sunarya, angka elektabilitas Haerdiat Sunarya jauh melampaui nama-nama yang juga digadangkan akan ikut berkontestasi di Pilkada Kabupaten Ciamis tahun 2024, yakni dengan angka 59,5% berdasarkan hasil dari survei yang dilakukan oleh Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA per tanggal 25-29 Agustus 2022. Berdasarkan hasil survei tersebut, menyatakan bahwa tingkat elektabilitas Herdiat Sunarya berada pada angka yang cukup tinggi.

Selama kepemimpinan beliau sebagai pemimpin, Kabupaten Ciamis berhasil beberapa kali memperoleh penghargaan yang luar biasa. Salah satunya ialah penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik dalam evaluasi kerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) wilayah Jawa-Bali tahun 2023, penghargaan ini diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah TT2PDD pada tanggal 3 Oktober 2023. Dilansir oleh mediapriangan.com (Raspati, 3 Oktober 2023) pada hari yang sama Kabupaten Ciamis mendapat 4 penghargaan skala nasional lainnya di berbagai kategori sekaligus menerima insentif fiskal sebesar 25,2 miliar sebagai apresiasi atas kinerja yang dicapai pemerintah Kabupaten Ciamis.

Hal-hal tersebut kemudian menjadi modal kuat untuk Herdiat kembali maju untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis periode 2025-2030. Menariknya, pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Ciamis Herdiat-Yana kembali maju dengan diusung penuh oleh 18 Partai politik yang ada yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Butuh, Gelora, PKS, PKN, Hanura, Partai Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Perindo, PPP dan Partai Ummat. Selain itu juga hanya ada satu pasangan calon yang maju di Pilkada Kabupaten Ciamis Ini sehingga membuat pasangan Herdiat-Yana harus melawan Kotak Kosong.

Fenomena dukungan semua parpol untuk Herdiat-Yana merupakan yang pertama kali nya sejak Kabupaten Ciamis melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dukungan 18 Partai Politik tentu menambah kekuatan politik Herdiat sebagai calon Bupati sekaligus juga menunjukkan kekuatan politik Herdiat yang sebenarnya. Oleh karena itu fenomena politik yang terjadi di

Kabupaten Ciamis pada Pilkada Serentak 2024 merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti, mengingat dalam sistem demokrasi kepartaian dan demokrasi kita yang melibatkan partai politik di dalamnya, dewasa ini di Ciamis partai politik bahkan mencalonkan Herdiat yang bukan kader dari seluruh partai politik pengusungnya. Namun Yana D. Puta sebagai calon Wakil Bupati merupakan ketua DPD PAN Kabupaten Ciamis.

Dukungan partai politik yang besar bisa dikaitkan dengan Politik Kartel yang mana merupakan fenomena partai-partai politik mengkonsolidasikan kekuatannya. Menurut Andi Suwarko dalam Artikel berjudul Politik Kartel, Anies Baswedan, dan Pilkada Jakarta 2024: Operasi Politik yang Mengubah Arah Kontestasi, Partai Politik bekerja sama untuk mengamankan kemenangan, tapi untuk menjaga stabilitas kekuasaan yang telah mereka bangun.

Politik Kartel di Indonesia sudah menjadi sebuah fenomena yang semakin kuat terutama pasca reformasi karena munculnya partai-partai besar yang saat ini menjadi pemain di arena politik Indonesia. Tidak hanya di nasional, namun merambah hingga ke daerah. Di Kabupaten Ciamis sendiri fenomena ini menarik untuk diteliti. Berkaitan dengan dukungan penuh seluruh partai politik dan juga tidak ada nya calon lain yang menjadi kontestan pada Pilkada serentak tahun 2024.

Tanda-tanda adanya politik kartel di Kabupaten Ciamis semakin terlihat dengan adanya relawan kotak kosong pada Pilkada Ciamis 2024 yang mana menurut pengamat politik dari STISIP Banjar Agus Dedi pada waancara nya

dengan Detik Jabar mengatakan bahwa hal itu menunjukkan adanya ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Partai Politik.

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh **Robi Anil Saleh (2023)** dengan judul **“Analisis sumber kekuatan politik kemenangan Al haris-sani pilkada 2020 dikota jambi Kecamatan telanaipura”**. Penelitian tersebut bertujuan mengetahui sumber kekuatan apa saja yang dimiliki oleh pasangan Al Haris-Sani dalam kemenangannya di Pilkada Kota Jambi pada tahun 2020 yang lalu.

Kemudian penelitian lainnya yaitu skripsi Putri Rahmawati dengan judul **“Politik Kartel (Studi Pada Koalisi Partai Pengusung Budi – Yusuf dalam Pilkada 2017)”** tahun 2021 yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena politik kartel terjadi pada koalisi partai pendukung pasangan calon Budi-Yusuf pada Pilkada 2017 Kota Tasikmalaya. Penelitian ini memiliki banyak kesamaan mengenai politik kartel di Pilkada Kota Tasikmalaya.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan diulas yaitu bagaimana dinamika politik melawan kotak kosong yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Ciamis 2024 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana Politik Kartel Terjadi Pada Koalisi pengusung Herdiat-Yana pada Pilkada serentak 2024?

2. Seperti apa konsolidasi partai-partai politik di Kabupaten Ciamis untuk mendukung hanya satu pasangan calon yaotu Herdiat Yana pada Pilkada Serentak 2024?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilaksanakan diatas dapat ditafsirkan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dan referensi bagi dunia akademik di bidang Ilmu Politik mengenai kajian tentang kekuatan politik seseorang dalam menjalankan langkah-langkah politiknya.

2. Manfaat Praktis.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta evaluasi terhadap cara kerja politisi atau partai agar ke depannya agar dapat menyiapkan diri ataupun kader untuk siap memimpin daerah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu kepada penulis terkait citra politik dari para aktor politik dan dapat mengetahui kekuatan politik dari aktor politik yang sedang berkontestasi di Pilkada.